



PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN

TAHUN
2024

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. disperindagblg@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. disperindagblg@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 050.24/045 /SK/DISPERINDAG-BLG/2024

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

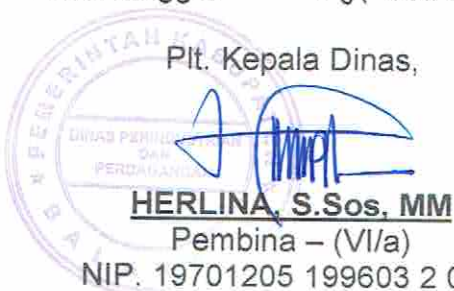
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program dan kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal beserta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 04 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas,



HERLINA, S.Sos, MM
Pembina – (VI/a)
NIP. 19701205 199603 2 003

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 050.24/045 /SK/DISPERINDAG-BLG/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dapat diselesaikan dan ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Nomor: 050.24/045/SK/DISPERINDAG-BLG/2024 pada tanggal 4 Juli 2024.

Dalam rangka untuk menunjang visi misi Bupati/Wakil Bupati Balangan tahun 2021-2026 yaitu **"Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera"**. Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Renja ini agar dapat dijadikan pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024.

Harapannya, semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Kabupaten Balangan.

Paringin, Juli 2024
Kepala Dinas,

HERLINA, S. Sos, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19701205 199603 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan I Tahun 2024.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	52
4.1 Analisa Sosial Ekonomi	52
4.2 Program dan Kegiatan	55
BAB V PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan s/d Triwulan I Tahun 2024	6
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.....	14
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Balangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan	29
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Balangan untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan Perubahan Renja ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2024 dengan fokus utama adalah :

1. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri
2. Meningkatkan Kontribusi Perdagangan pada Ekonomi Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan sampai dengan triwulan satu pada tahun perencanaan atau tahun berjalan ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja tahun 2024. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke satu tahun 2024, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan penganggaran daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar program, kegiatan maupun antar jenis belanja serta perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan tahun 2024 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kabupaten Balangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Renja tahun 2024. Hal ini agar konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan pencapaian visi dan misi lebih efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan ini merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program satuan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2024. Dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2024 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan I Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024

	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III.		TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV.		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1	Analisa Sosial Ekonomi
	4.2	Program dan Kegiatan
BAB V.		PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan I Tahun 2024

Dinas Perindustrian Kabupaten Balangan pada tahun 2024 secara keseluruhan melaksanakan 10 Program, 9 Program termasuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja dari keberhasilan/kegagalan program tersebut. Secara keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan telah menetapkan kelompok indikator kinerja untuk masing-masing program tersebut, walaupun untuk beberapa program indikator kinerja *outcome*-nya belum seluruhnya dapat diukur tingkat capaiannya, sehingga ada beberapa program yang menggunakan indikator sasaran sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja, Indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan s/d Triwulan I Tahun 2024

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJASTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENJASTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENJASTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7+9)	11 = (10/4)
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	14	3	2		100.00	7	5	71.43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	32	7	5		100.00	17	12	70.59
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	3178	784	546		96.34	1856	1.310	70.58
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	84	24	12	526	100.00	48	36	75.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	9	0	0	0.00	9	9	100.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	7	2	1	1	100.00	4	3	75.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	35	16	4	4	100.00	31	20	64.52
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	0			0.00	1	-	0.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	14	4	2	2	100.00	8	6	75.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	21	6	1	1	100.00	10	7	70.00

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3			6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7 +9)	11 = (10/4)
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	4	5			100.00			75.00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7	2		1		4	3	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	18	0			0.00	0	-	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	51	0		9	100.00	9		100.00
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	7	2		1	100.00	4	3	75.00
Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	7	2		1	100.00	4	3	75.00
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	55	35		50	76.00	50.00	38	76.00
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100	97		170	100.00	92.00	170	184.78
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	1				2	1	50
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	6	1			0.00	3	1	33.33
Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	27	7		3	100.00	17	10	58.82
	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	12	9		4	125.00	10	9	90.00

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENTJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENTJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENTJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7 +9)	11 = (10/4)
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5	1	1	1	100.00	3	2	66.67
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5	1	1	1	100.00	3	2	66.67
Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang (Pelaku Usaha)	15	0	10	10	100.00	15	10	66.67
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	15	0		10		4	10	250.00
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina (Pelaku Usaha)	3	0	3	1	33.33	0	1	0.00
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan ritel, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	10	0	10	19	190.00	0	19	0.00
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Dokumen)	1	1			0.00	0	1	0.00
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	35	0			0.00	0	0	0.00
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan ritel, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	20	0			0.00	20	0	0.00

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	4 4	0 0	1	1	100.00	2	1	50.00
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	7	1				0	1	
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	13	0	30		0.00	9	6	66.67
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen)	1	0			0.00	0	0	0.00
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	7	0			0.00	0	0	0.00
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	9	0			0.00	0	0	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3	0			0.00	0	0	0.00

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	0			0.00	12	-	0.00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	84	24	12	12	100.00	36	36	100.00
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	7	2	1	1	100.00	4	3	75.00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang (Unit)	1500	1105	1200	1034	86.17	1300	1034	79.54
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dilbina (Orang)	350	100	50	51	102.00	201	151	75.12
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3	0			0.00	0	-	0.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	7	2	1	1	100.00	4	3	75.00

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7 +9)	11 = (10/4)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS (Dokumen)	4	2	1	1	100.00	3	3	100.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3	0			0.00	0	0	0.00
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	7	0			0.00	1	-	0.00

URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TAHUN (N-2) TH 2023	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 +7+9)	11 = (10/4)	
Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	5	1	1	1	100.00	3	2		66.67
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	1	1	1	100.00	3	2		66.67

Pada Tabel 2.1 disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2024. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan Belanja Daerah untuk tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.473.182.637,- atau 5,26% dari total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 28.023.124.600,- (APBD).

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran belum mencukupi kebutuhan/pengajuan anggaran dari Perangkat Daerah, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Permasalahan lain yang timbul adalah tidak adanya mobil operasional serta penurunan masa manfaat kendaraan dinas jabatan kepala dinas dan sekretaris dinas sebagai sarana transportasi mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dengan kegiatan antara lain, koordinasi, konsultasi, pengumpulan data, penyuluhan metrologi legal, pembinaan, evaluasi dan monitoring yang mobilitasnya cukup tinggi selain itu mengingat jangkauan dan pelaksanaan cukup luas dan padat seringkali mengalami kendala sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 telah melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ada yang telah melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi meskipun target yang ditetapkan dalam renstra ada yang telah tercapai akan tetapi kegiatan tersebut tetap dilaksanakan untuk terus menjaga agar tidak terjadi penurunan capaian kinerja untuk masing-masing Urusan Pemerintahan yang diampu oleh SKPD. Untuk lebih jelas terkait rincian pencapaian kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Balangan

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi					Proyeksi			Catatan Analisis						
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2025		Tahun 2026			
			Rp	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp		10	Rp	11	Rp	12	Rp
1	2	3																				14
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan			5.50	3.84	6.40	6.50	5.97	5.50	3.84	4.16	6.60	6.70										
Kontribusi PDRB Sektor Industri			1.90	1.29	1.99	2.00	1.98	1.90	1.29	1,26	2.01	2.02										
Peningkatan Volume Perdagangan (Miliar Rupiah)			671.41	751.05	791.2	831,350	640.39	671.41	751.05	867.76	871.50	911.65										
Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan			0.1440	0.0567	0.0480	0,0549		0.1440	0.0567	0.0799	0.0567	0.0578										
Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat					1.18	1,68				1.18	2.31	2.94										
Persentase Pasar di Kabupaten Balangan yang Memenuhi Standar Kelayakan Pasar (%)						10.00				0.45	10.00	10.00										
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor (%)					30.00	50.00				10.00	70.00	100.00										
Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal (%)						7.88					21.74	25.00										

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026			
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)			8.42	9.84	12.00	17.85	4.80	8.42	9.84	16.80	18.42	20.00			
Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Dilaksanakan (%)											100	100			
Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)			7.85	6.10	7.60	7.40	8.08	7.85	6.10	7.51	7.00	6.80			
Persentase Jumlah Kegiatan Metrologi Legal Dilaksanakan (%)			61.53	69.23	61.53	69.23	46.15	61.53	69.23	61.11	76.92	84.61			
Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan (%)					20.83	25.00				20.69	29.16	33.33			
Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri (%)			6.81	10	12	13.00	4.10	6.81	10	12.39	14.00	15.00			

Bidang Perindustrian sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah melaksanakan telah melaksanakan pemberian bantuan alat/mesin industri, memberikan bantuan depo air 1 unit kepada 1 IKM. Adapun untuk Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) sampai dengan triwulan I 2024 berjumlah sebanyak 2.421 unit usaha dengan seluruhnya adalah Industri Kecil.

Untuk Urusan Perdagangan pada sektor sarana dan prasarana perdagangan sampai dengan triwulan I 2024. Pertama, telah melaksanakan pembangunan/rehab/perbaikan pasar melalui program peningkatan sarana distribusi perdagangan, antara lain:

1. Revitalisasi pembangunan pasar bihara masih dalam tahapan perencanaan dan masih dalam proses pengadaan fisik berupa perbaikan beberapa titik atap bocor, cor lantai/los pasar depan dan membuat lapak pedagang pada sisi/zona penjualan pakaian.
2. Revitalisasi bangunan pasar modern paringin masih dalam tahap perencanaan.
3. Revitalisasi drainase pasar batumandi masih dalam tahap perencanaan.
4. Revitalisasi lantai pasar awayan masih dalam tahap perencanaan.
5. Revitalisasi pasar uren masih dalam proses pengadaan fisik.
6. Pembuatan pagar beton pasar modern paringin masih dalam tahap perencanaan.

Seialin itu juga telah melaksanakan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sampai dengan triwulan I 2024 melalui :

1. Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui UPTD Pasar telah menyelenggarakan kegiatan pasar ramadhan 1445 H selama 29 hari terhitung tanggal 12 maret 2024 sampai dengan 9 april 2024 yang diikuti sebanyak 115 UMKM. Kegiatan berupa fasilitasi tenda yang diberikan kepada para peserta secara gratis, fasilitasi tenda kerucut dengan 2 x 2 m sebanyak 24 tenda, dan tenda biasa 6 x 4 m sebanyak 28 tenda. Kemudian telah melakukan kegiatan pembersihan pasar berupa pembersihan drainase pada 2 (dua) pasar, yaitu pasar batumandi dan pasar halong.
2. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan berupa penataan pedagang dilingkungan pasar dengan membentuk tim penataan pedagang di kabupaten balangan yang terdiri dari unsur

Disperindag, UPTD Pengelola Pasar, Kecamatan Se-kabupaten Balangan, Dishub, Satpol PP, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan Polres Balangan.

3. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan berupa kegiatan membangun komunikasi dengan asosiasi/paguyuban pedagang.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung pasar, mengingat pasar merupakan sentra perdagangan yang ada di Kabupaten Balangan.

Dalam hal pembinaan pelaku usaha perdagangan melalui:

1. Program pengembangan ekspor, antara lain:
 - a. Fasilitasi pelaku usaha UMKM dalam pameran dagang dalam event balangan expo sebanyak 115 (seratus lima belas) UMKM.
 - b. Misi dagang bagi produk ekspor unggulan berupa penyusunan bahan persentasi 3 (tiga) UMKM (Gula semut ,anyaman purun dan anyaman tirik) produk dalam agenda kegiatan mengikuti trade meeting of south Kalimantan province 2024.
2. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri berupa penjangkaran pelaku usaha UMKM baru untuk difasilitasi dalam melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhorelan dan jasa akomodasi.

Urusan Perdagangan pada sektor Kemetrolagian dan Stabilisasi Harga sampai dengan Maret 2024 telah melaksanakan pertama, kegiatan pendataan harga bahan pokok dan barang penting sebanyak 16 kali di 2 (dua) pasar, yaitu Pasar Modern Adaro dan Pasar Batumandi guna mengukur tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Dalam rangka penanganan inflasi di daerah telah dilaksanakan kegiatan menggelar pasar murah sebanyak 13 kali, yang terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan pasar sebagai berikut :

1. Pasar Murah Reguler

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
1	23 Januari 2024	Galumbang	Paringin Selatan
2	29 Januari 2024	Simpang Tiga	Lampihong
3	30 Januari 2024	Halubau	Paringin Selatan
4	07 Februari 2024	Mamigang	Halong

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
5	20 Februari 2024	Hamarung	Juai
6	22 Februari 2024	Ju'uh	Tebing Tinggi
7	23 Februari 2024	Halaman Kecamatan Paringin	Paringin
8	07 Maret 2024	Baruh Penyambaran	Halong
9	20 Maret 2024	Halaman Kecamatan Paringin Selatan	Paringin Selatan
10	22 Maret 2024	Paringin Timur	Paringin
11	25 Maret 2024	Karuh	Batumandi
12	25 Maret 2024	Tundi	Awayan

2. Pasar Murah Khusus (HKBN)

No	Tanggal	Desa	Kecamatan
1	20 Maret 2024	Halaman Kecamatan Paringin Selatan	Paringin Selatan

Kedua, kegiatan tera ulang telah dilaksanakan pada 1 (satu) SPBU yaitu PT. Putri Fajar Sukses Mandiri sebanyak 5 UTTP, tera ulang juga telah dilaksanakan pada pasar sirap kecamatan juai sebanyak 44 UTTP sedangkan layanan tera kantor hingga saat ini baru melayani permintaan sebanyak 3 UTTP.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam upaya terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi saat ini sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SKPD kami, yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang kami hadapi sampai dengan triwulan I tahun 2024 ini, antara lain :

1. Masih kurangnya tenaga aparatur di masing-masing bidang sehingga pendataan/pemetaan terhadap pelaku usaha industri/pelaku usaha/pedagang sebagai bahan informasi untuk pertumbuhan wirausaha baru sedikit terhambat.

2. Masih kurangnya produk lokal yang mampu bersaing dipasar global antara lain karena kemasan yang masih belum menarik/tradisional serta ketersediaan bahan baku yang kadang sulit di dapat dalam jumlah banyak untuk waktu yang singkat, sehingga membuat investor cenderung ragu untuk berinvestasi selain itu masih kurangnya promosi-promosi terhadap produk unggulan membuat produk unggulan tersebut kurang dikenal oleh masyarakat maupun calon investor.
3. Tidak adanya kendaraan mobil dinas operasional layak yang mendukung aktifitas kerja di lapangan.
4. Belum sepenuhnya mandiri dalam pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang ditahun keempat renstra 2021-2026 di Kabupaten Balangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 segala kegiatan terkait metrologi legal (termasuk tera/tera ulang) dilaksanakan secara mandiri oleh tiap kabupaten/kota. Kabupaten Balangan belum dapat melaksanakan secara penuh kegiatan metrologi legal dikarenakan masih adanya peralatan yang belum dimiliki lengkap sebagai unit metrologi legal dan keterbatasan jumlah tenaga fungsional penera Kabupaten Balangan, yang masih memerlukan bantuan tenaga penera dari BSML dalam pelaksanaan tera/tera ulang di Kabupaten Balangan tahun ini.
5. Belum optimalnya pembinaan kepada pedagang dan pedagang masih melanggar aturan akan tata letak dagangan.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan perubahan renja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan kembali pengembangan dan pemasaran terhadap produk lokal unggulan daerah.
2. Perlu terus dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan bagi pelaku usaha (IKM) agar produk yang dihasilkan dapat berkelanjutan serta mampu bersaing dipasar global.
3. Perlunya pendataan pedagang yang lebih komprehensif sebagai data dasar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdagangan.
4. Perlunya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan.
5. Perlunya kendaraan mobil dinas operasional lapangan.
6. Perlunya pendataan potensi UTTP yang sudah dapat terlayani tera tera ulang dan pengawasan perdagangan agar konsumen terlindungi.

Dari uraian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran pada

tahun 2024, yaitu perluasan dan penguatan akses pemasaran produk UMKM, Pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha IKM, Pembinaan dan penataan pedagang, Penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, kemetrollogian dan pengawasan kemetrollogian menjadi fokus untuk dilaksanakan.

Beberapa masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi ditahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Penerapan dan penguasaan teknologi masih sangat terbatas hal ini terlihat dari total 2.421 IKM, baru 300 IKM atau sebesar 12,39% yang sudah mendapatkan pelatihan teknologi industri dari total seluruh IKM. Hal ini berdampak kepada biaya produksi menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas.
2. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM pelaku usaha sehinga menghambat pertambahan nilai transaksi sektor perdagangan (volume perdagangan).

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing IKM dalam penerapan teknologi industri dan bantuan alat produksi.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
3. Peningkatan nilai transaksi perdagangan (volume perdagangan).
4. Peningkatan perlindungan konsumen.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan baik, meskipun ada beberapa sasaran dari kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat tercapai. Dalam dokumen ini memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program hasil review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2024 beserta indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan untuk masing-masing program yang merupakan representasi tugas

pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Balangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	78.20	%	5,822,016,400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	78.20	%	10,844,605,692	
			PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	%				PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	%		
			NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	88.30	Nilai SKM				NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	88.30	Nilai SKM		
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	18,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	66,227,000	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	8,000,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	38,740,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Laporan	27,487,000	
3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	Dokumen		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
				5	6					11	12		
I	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100	4,340,805,500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	5,658,832,442		
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546	Orang/bulan	4,143,658,360		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	437	Orang/bulan	5,380,019,042		
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	197,147,140		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	278,813,400		
III	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang Baik (%)	0	%	-		Persentase Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	%	509,520,000		
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	Orang	-		Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60	Orang	509,520,000		
IV	Administrasi Umum perangkat daerah		Persentase Layanan Adminitrsi Umum Perangkat Daerah yang baik	100	%	602,933,700		Persentase Layanan Adminitrsi Umum Perangkat Daerah yang baik	100	%	2,287,824,400		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	17,637,600		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	17,637,600		
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11	Paket	252,204,900		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18	Paket	1,436,544,700		
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	59,986,200		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	59,986,200		
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	56,707,600		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	56,707,600		

Rancangan Awal RKPD													Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Pen-ting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	Dokumen	5,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	Dokumen	5,000,000					
12	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	211,397,400	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	711,948,300					
V	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	249,062,850	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	307,074,500					
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	157,199,150	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	179,861,400					
14	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	laporan	91,863,700	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	laporan	127,213,100					
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	0	%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	%	1,185,655,000					
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	Unit	1,185,655,000					
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	611,214,350	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	829,472,350					

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penjelasan	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)		
				5	6					11	12			
1	16	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50	Unit	243,046,350	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50	Unit	256,596,350	
	17	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	92	Unit	34,270,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	92	Unit	34,270,000	
	18	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	34,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	34,000,000	
	19	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	299,898,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	504,806,000	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN	15.15	%	116,750,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN	17.85	%	276,750,000	
				PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	9	%				PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	100	%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	50	Buah	75,600,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	50	Buah	75,600,000	
20	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumentasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	75,600,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumentasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	75,600,000	
IX	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)	0	Buah	-	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)	3	Buah	60,000,000	
21	Fasilitasi Penerbitan Tanda daftar gudang	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0	Dokumen	-	Fasilitasi Penerbitan Tanda daftar gudang	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3	Dokumen	60,000,000	
X	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri	9	Buah	41,150,000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri	9	Buah	41,150,000	
22	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	9	Dokumen	41,150,000	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	9	Dokumen	41,150,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XI	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan (Kali)	0	Kali	-	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan (Kali)	3	Kali	50,000,000	
23	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	0	Laporan	-	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3	Laporan	50,000,000	
XII	Penerbitan surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	0	Buah	-	Penerbitan surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	1	Buah	50,000,000	
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (KSA)	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	0	Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1	Dokumen	50,000,000	
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR	10.00	%	13,654,872,700	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR	10.00	%	13,836,978,700	
XIII	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Pasar yang direvitalisasi	83.33	%	13,523,673,300	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Pasar yang direvitalisasi	83.33	%	13,688,179,300	

Rancangan Awal RKPD														Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan ata n Pen ting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)							
				4	5					6	7		8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
25	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7	unit	12,224,438,100	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7	unit	11,689,312,700							
26	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	unit	1,299,235,200	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	unit	1,998,866,600							
XIV	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya	60.00	%	131,199,400	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya	70.00	%	148,799,400							
27	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	65,599,700	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	62,819,700							
28	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	65,599,700	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	85,979,700							
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	7.40	%	757,219,200	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	7.40	%	1,172,019,100							
XV	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	66	Kali	757,219,200	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	66	Kali	1,172,019,100							
			Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	47	Kali				Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	65	Kali								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.)
				5	6					11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	126,576,700	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	241,376,600	
30	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	630,642,500	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	930,642,500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR	50.00	%	1,973,984,500	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR	50.00	%	2,569,134,000	
XVI	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor	33.33	%	1,973,984,500	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor	33.33	%	2,569,134,000	
			Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat	5	Pelaku usaha				Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat	5	Pelaku usaha		
31	Pameran Dagang Nasional	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	15	Pelaku usaha	1,922,384,500	Pameran Dagang Nasional	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	15	Pelaku usaha	2,414,957,500	
32	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4	Pelaku usaha	51,600,000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4	Pelaku usaha	154,176,500	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	69.23	%	578,639,200	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	69.23	%	744,252,700	
			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	25.00	%				PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	25.00	%		

Rancangan Awal RKPD													Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penitng
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
35	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20	UMKM	50,600,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20	UMKM	51,500,000					
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	13.00	%	3,937,611,600	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	13.00	%	6,962,826,500					
XIX	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan	5	IKM	3,937,611,600	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan	5	IKM	6,962,826,500					
36	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi	325	IKM		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi	325	IKM						
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM	1.98	%	75,530,600	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM	1.98	%	106,805,200					
XX	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah IKM yang Memiliki Izin	82	IKM	75,530,600	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah IKM yang Memiliki Izin	82	IKM	106,805,200					

Rancangan Awal RKPD														Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pen ting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
37	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Balangan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	75.530.600	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Balangan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	106,805,200							
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG	1.58	%	1,055,900,400	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG	1.58	%	1,154,410,500							
XXI	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Nilai Pemasaran Produk IKM	273.62	Rp	1,055,900,400	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Nilai Pemasaran Produk IKM	273.62	Rp	1,154,410,500							
			Jumlah Produk IKM Bersertifikasi	146	IKM				Jumlah Produk IKM Bersertifikasi	146	IKM								

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini dapat bersumber dari usulan SKPD, dari masukan pihak legislatif (DPRD) maupun aspirasi dari masyarakat dimana usulan-usulan Program dan Kegiatan tersebut telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang terkait dengan usulan yang bersumber dari sektor atau bidang Sosial Ekonomi biasanya meliputi usulan mengenai pemberdayaan masyarakat, pembinaan pelaku usaha dan bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha.

Semua usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan usulan dari pokok pikiran (Pokir) pihak legislatif/DPRD akan diverifikasi dan apabila sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dan atau apabila memungkinkan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan dana yang ada akan diakomodir pada program dan kegiatan perubahan pada tahun anggaran 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan sebagai berikut :



Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-IV (2019-2025) diarahkan untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.

Secara garis besar arah pembangunan nasional Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui

- percepatan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, mengurangi ketergantungan impor barang dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
2. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam negara berpendapatan menengah.

Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Perindustrian mempunyai target kinerja pembangunan yang difokuskan pada Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia industri dengan beberapa indikator seperti tersedianya sumber daya manusia aparatur yang kompeten, terselenggaranya pelatihan industri berbasis spesifikasi dan kompetensi, terfasilitasinya pengembangan Sumber Daya Manusia industri, terfasilitasinya sarana perdagangan serta penguatan infrastruktur kelembagaan. Sedangkan target kinerja pembangunan pada kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diprioritaskan pada peningkatan peran usaha mikro dan kecil dan koperasi dalam penanggulangan kemiskinan, dengan indikator, peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM, perluasan dan penguatan akses pemasaran bagi koperasi dan UMKM, serta perluasan KUR melalui program peningkatan daya saing UMKM. Selain itu pengembangan keanggotaan koperasi melalui penyuluhan dan kaderisasi melalui program penguatan kelembagaan koperasi.

Dalam rangka sinkronisasi Program antara Program Nasional dengan Program Daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan Renja tahun 2023 kami memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Adapun program yang akan kami rencanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
2. Penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem informasi berupa kemudahan akses permodalan, pembinaan manajemen usaha serta pemasaran.
3. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam menumbuhkan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

4. Penempatan/Penyertaan Modal Negara/Daerah dalam rangka mendukung program KUR.
5. Peningkatan kemampuan teknologi industri untuk mendorong peningkatan kegiatan pemerintahan daerah yang bersifat padat karya untuk mengurangi angka pengangguran dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD kami di tahun 2024 adalah pembinaan serta pendampingan IKM, meningkatkan pertumbuhan IKM baru/wira usaha baru (WUB), meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha pedagang, peningkatan transaksi perdagangan (volume perdagangan), peningkatan perlindungan konsumen serta optimalisasi kualitas produk unggulan melalui pembinaan yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tidaklah terlepas dari tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan yang mana tujuan tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2021-2026, yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun secara khusus tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri
2. Meningkatkan Kontribusi Perdagangan pada Ekonomi Daerah

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya Pendapatan IKM
2. Meningkatnya Produktivitas Perdagangan
3. Meningkatnya Perlindungan Konsumen

Sasaran tersebut kami upayakan dalam rangka salah satu pencapaian sasaran Kabupaten Balangan yaitu Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa. Melalui pembinaan secara terus menerus terhadap IKM/pelaku usaha/pedagang agar berdaya saing guna mendukung Misi 2 dalam meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Analisa Sosial Ekonomi

Analisa dilakukan pada 2 urusan pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Melalui sosialisasi tata cara pengajuan permohonan surat rekomendasi dan atau fasilitasi permohonan perizinan elektronik terintegrasi berbasis resiko (OSS-RBA) untuk membantu masyarakat/pelaku usaha dalam mendapatkan surat keterangan izin usaha dan atau surat rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui kegiatan pendataan waralaba informasi pelaku usaha kemitraan waralaba yang ada di Kabupaten Balangan dikumpulkan sebagai bahan awal bagi Dinas/Bidang/Instansi terkait untuk meningkatkan kegiatan usaha waralaba, melaksanakan pembinaan serta monitoring keberlangsungan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Balangan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Bertujuan untuk menunjang peningkatan sarana distribusi perdagangan (pasar) melalui beberapa kegiatan yaitu, pembangunan sarana distribusi perdagangan, revitalisasi atau perbaikan sarana distribusi perdagangan, pemeliharaan sarana distribusi perdagangan, pemberdayaan dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan serta penataan pedagang. Adapun dampak dan manfaat dari program, diantaranya :

Dengan melakukan pembangunan pasar atau revitalisasi pasar, akan dapat memperbanyak lapak/tempat pedagang yang dapat berjualan pada pasar tersebut. Melalui pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu pemeliharaan, pembersihan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan, fasilitas sarana

perdagangan yang telah ada dapat terpelihara dan tidak kumuh, nyaman saat berbelanja/bertransaksi serta kemudahan akses hingga tertatanya pedagang membuat pasar akan terlihat rapi. Pasar adalah salah satu titik penting dalam perekonomian sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dan tempat perputaran uang.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan yang dilakukan untuk menstabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga/inflasi di daerah dengan langkah nyata berupa pelaksanaan kegiatan pasar murah dalam upaya membantu menjaga nilai daya beli masyarakat.

d. Program Pengembangan Ekspor

Memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan pemasaran produknya ke pasar yang lebih luas melalui pameran dagang yang dapat diikuti dan pelatihan ekspor. Program ini bertujuan menghimpun produk lokal dan unggulan daerah untuk dapat mempromosikan produknya. Diharapkan dapat membantu produk lokal dan unggulan daerah dalam mempromosikan dan memasarkan dengan difasilitasi untuk mengikuti pameran dagang dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan atau omset peserta pameran dagang serta menumbuhkan ekonomi kreatif.

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Guna memberikan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan terjaminnya kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan serta memastikan kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan dengan perlindungan hukum dan keadilan transaksi agar dapat meningkatkan saling kepercayaan dalam transaksi jual beli di masyarakat.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Memfasilitasi produk lokal dan unggulan daerah agar dapat masuk retail-retail modern guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan mengembangkan pemasaran produk lokal dan unggulan daerah yang dituangkan kedalam hubungan kerjasama (Mou) dengan retail modern.

2. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui pelatihan IKM. Melalui pelatihan IKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan ketrampilan dalam proses produksi maupun peningkatan manajerial, IKM diajarkan untuk meningkatkan produktifitas produksi sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Pelatihan tidak hanya diajarkan tentang operasional dan teknis namun IKM juga diberikan pengertian tentang teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk efisiensi kerja.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Pengendalian Izin Usaha Industri melalui sertifikasi halal gratis. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan fasilitasi sistem jaminan halal (SJH) kepada IKM untuk didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal produk olahannya. Karena dengan sudah memiliki sertifikasi halal produk memberikan banyak manfaat kepada peningkatan penjualan produk. Berikut beberapa manfaat dari sertifikasi halal bagi produsen. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari konsumen, karena dengan adanya label halal produk, maka konsumen tidak merasa khawatir dengan kandungan pada produk. Kedua, dapat meningkatkan luas jangkauan pemasaran, kepercayaan konsumen yang baik dapat meningkatkan jangkauan pasar dari produk olahan. Produk akan semakin dikenal dan menjadi pilihan oleh masyarakat luas. Dengan hal ini, produk memiliki peluang untuk memperluas jaringan pemasaran hingga ke daerah lain.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Dijaman era digitalisasi seperti sekarang banyak kebijakan pemerintah yang mengarah pada sistem pelayanan, perijinan dan pendataan secara online. Banyak para pelaku usaha Industri Kecil Menengah yang belum bisa melakukan secara mandiri, untuk menyikapi hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan memberikan fasilitasi kepada para Industri Kecil Menengah (IKM) untuk memperoleh perijinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB)

melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), memfasilitasi pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Pelatihan Industri (SIMANIS) serta memfasilitasi pendaftaran dan pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan juga melakukan pendataan bagi para Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada diseluruh Kabupaten Balangan guna mempermudah untuk melakukan pembinaan dan mengukur tingkat produktivitas para IKM. Selain itu juga melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha agar mendapatkan pemahaman lebih terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Bersama Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) Kabupaten Balangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan berusaha mewujudkan Industri Kerajinan Balangan yang mandiri dan berdaya saing berbasis sumber daya unggulan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah dengan cara mempromosikan hasil-hasil kerajinan IKM Balangan melalui partisipasi pameran-pameran baik skala kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu juga melakukan pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kreativitas para pengrajin sehingga mereka mampu berinovasi dan terus meningkatkan kualitas hasil kerajinan mereka.

4.2 Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Penyusunan Perubahan Renja tahun 2024 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan I tahun 2024.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan I tahun 2024.
3. Prioritas pengembangan sektor Perindustrian dan sektor Perdagangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

b. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Pergeseran anggaran antar kegiatan maupun antar jenis belanja, penambahan atau pengurangan anggaran dan penambahan atau penghapusan kegiatan sebagai akibat dari perkembangan keadaan yang tidak sesuai.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 8.000.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 38.740.000,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 10.000.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 27.487.000,-
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 4.143.658.360,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 5.380.019.042,-
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 197.147.140,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 278.813.400,-

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 509.520.000,-
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 252.204.900,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.436.544.700,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 211.397.400,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 711.948.300,-
- Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 157.199.150,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 179.861.400,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 91.863.700,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 127.213.100,-
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.185.655.000,-
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 243.046.350,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 256.596.350,-
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 299.898.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 504.606.000,-

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 3.937.611.600,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 6.962.826.500,-
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 75.530.600,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 106.805.200,-
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 146400000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 244910000,-
 - Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 909.500.400,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 909.500.500,-

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda daftar gudang dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 60.000.000,-
 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2) dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 50.000.000,-
 - Penerbitan surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 50.000.000,-
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 12.224.438.100,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 11.689.312.700,-
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 1.299.235.200,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.998.866.600,-
 - Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebelum

- perubahan Rp. 65.599.700,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 62.819.700,-
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 65.599.700,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 85.979.700,-
 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 126.576.700,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 241.376.600,-
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 630.642.500,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 930.642.500,-
 - Program Pengembangan Ekspor
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 1.922.384.500,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 2.414.957.500,-
 - Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 51.600.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 154.176.500,-
 - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 486.010.700,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 601.503.700,-

- Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 92.628.500,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 142.749.000,-
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 50.600.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 51.500.000,-

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		5,822,016,400	10,844,605,692	5,022,589,292	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18,000,000	66,227,000	48,227,000	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	8,000,000	38,740,000	30,740,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi SKPD	Kab. Balangan	10,000,000	27,487,000	17,487,000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,340,805,500	5,658,832,442	1,318,026,942	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	4,143,658,360	5,380,019,042	1,236,360,682	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	197,147,140	278,813,400	81,666,260	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	509,520,000	509,520,000	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	-	509,520,000	509,520,000	
IV	Administrasi Umum perangkat daerah		602,933,700	2,287,824,400	1,684,890,700	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	17,637,600	17,637,600	-	
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	252,204,900	1,436,544,700	1,184,339,800	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balangan	59,986,200	59,986,200	-	
9	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kab. Balangan	56,707,600	56,707,600	-	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	5,000,000	5,000,000	-	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	211,397,400	711,948,300	500,550,900	
V	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		249,062,850	307,074,500	58,011,650	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	157,199,150	179,861,400	22,662,250	
13	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	91,863,700	127,213,100	35,349,400	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		-	1,185,655,000	1,185,655,000	
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	-	1,185,655,000	1,185,655,000	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		611,214,350	829,472,350	218,258,000	
15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	243,046,350	256,596,350	13,550,000	
16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	34,270,000	34,270,000	-	
17	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	34,000,000	34,000,000	-	
18	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	299,898,000	504,606,000	204,708,000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		116,750,000	276,750,000	160,000,000	
VIII	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan		75,600,000	75,600,000	-	
19	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	75,600,000	75,600,000	-	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Keterangan
			(Rp)	4	(Rp)	5		
1	2	3					6	7
IX	Penerbitan Tanda Daftar Gudang							
20	Fasilitasi Penerbitan Tanda daftar gudang	Kab. Balangan	-		60,000,000		60,000,000	
X	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		-		60,000,000		60,000,000	
			41,150,000		41,150,000		-	
21	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	41,150,000		41,150,000		-	
XI	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-		50,000,000		50,000,000	
22	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Kab. Balangan	-		50,000,000		50,000,000	
XII	Penerbitan surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		-		50,000,000		50,000,000	
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Kab. Balangan	-		50,000,000		50,000,000	
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		13,654,872,700		13,836,978,700		182,106,000	
XIII	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		13,523,673,300		13,688,179,300		164,506,000	
24	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	12,224,438,100		11,689,312,700		(535,125,400)	
25	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	1,299,235,200		1,998,866,600		699,631,400	
XIV	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		131,199,400		148,799,400		17,600,000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
26	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	65,599,700	62,819,700	(2,780,000)	
27	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	65,599,700	85,979,700	20,380,000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		757,219,200	1,172,019,100	414,799,900	
XV	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		757,219,200	1,172,019,100	414,799,900	
28	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	126,576,700	241,376,600	114,799,900	
29	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	630,642,500	930,642,500	300,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		1,973,984,500	2,569,134,000	595,149,500	
XVI	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1,973,984,500	2,569,134,000	595,149,500	
30	Pameran Dagang Nasional	Kab. Balangan	1,922,384,500	2,414,957,500	492,573,000	
31	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	51,600,000	154,176,500	102,576,500	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		578,639,200	744,252,700	165,613,500	
XVII	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		578,639,200	744,252,700	165,613,500	
32	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Balangan	486,010,700	601,503,700	115,493,000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
33	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	92,628,500	142,749,000	50,120,500	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		50,600,000	51,500,000	900,000	
XVIII	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		50,600,000	51,500,000	900,000	
34	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	50,600,000	51,500,000	900,000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		3,937,611,600	6,962,826,500	3,025,214,900	
XIX	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		3,937,611,600	6,962,826,500	3,025,214,900	
35	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	3,937,611,600	6,962,826,500	3,025,214,900	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		75,530,600	106,805,200	31,274,600	
XX	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		75,530,600	106,805,200	31,274,600	
36	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Balangan	75,530,600	106,805,200	31,274,600	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		1,055,900,400	1,154,410,500	98,510,100	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
XXI	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		1,055,900,400	1,154,410,500	98,510,100	
37	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Balangan	146,400,000	244,910,000	98,510,000	
38	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	909,500,400	909,500,500	100	
	TOTAL		28,023,124,600	37,719,282,392	9,696,157,792	

BAB V PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun anggaran 2024 ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan. Rincian daftar program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja tahun anggaran 2024 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu. Selain **input** yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan kegiatan. **Input** dan **proses** akan memberikan **benefit** dan **impact** kepada **output** maupun **outcome**, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan petunjuk didalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggungjawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Balangan dalam Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera.

Kesadaran untuk secara terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan penganangan penerapan *Good Governance* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka *revitalisasi* diri maupun organisasi.

Paringin, Juli 2024
Plt. Kepala Dinas,





**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. disperindagblg@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BALANGAN**

NOMOR : 800/0351/SK/DISPERINDAG-BLG/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas

- Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - e. melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - g. melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 29 April 2024

Plt. Kepala Dinas,


HERLINA, S.Sos, MM
Pembina – (VI/a)
NIP. 19701205 199603 2 003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800/835.1/SK/DISPERINDAG-BLG/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2024**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Hj. HERLINA, S. Sos, MM NIP. 19701205 199603 2 003	Plt. Kepala Dinas	Penanggung jawab
2	SAHRIL, S.Kom NIP. 19851127201001 1 014	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3	SYAHRIDHA ELYANI, S.Pi, M.P NIP. 19810123 200501 2 015	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Sekretaris
4	MISRINAWATI, S.Sos NIP. 19720421 199603 2 005	Kepala Bidang Kemetrologian dan Stabilisasi Harga	Anggota
5	Hj. IDA ROSIYANTI, SE NIP. 19780620 200604 2 021	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
6	SAMSUL BAKHRI, S.Pd.I, MM NIP. 19831125 200801 1 006	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	EKA MAYA JURADA, SE NIP. 19751230 200604 2 020	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
8	MAYDHILA SAPUTRI, S.Si NIP. 19840516 2009 2 009	Jf Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	Anggota
9	ASBIT, SE NIP. 19810817 201503 1 001	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
10	ARIEFANSYAH, A.Md NIP. 19811031 200604 1 015	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
11	SUNTARI SRI REJEKI, ST,MT NIP. 19821019 200604 2 007	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
12	ALFIAN NOOR, S.Sos NIP. 19781219 201001 1 012	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli	Anggota

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
		Muda	
13	NURLIANA, AMK NIP. 19860224 200904 2 002	Kepala UPTD Pasar	Anggota

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 29 April 2024

Plt. Kepala Dinas,

HERLINA, S.Sos, MM
Pembina – (VI/a)
NIP. 19701205 199603 2 003